



Sarat Penggelembungan Anggaran

KASUS pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) 2014 untuk sekolah disinyalir terjadi penggelembungan (mark up). Pengamat Kebijakan Publik Robert Endi Jaweng meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit anggaran proyek.

Direktur Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) ini juga sepakat dengan kecurigaan Ahok yang menganggap harga miliaran rupiah untuk satu unit alat penyimpanan listrik berkapasitas besar itu di luar batas kewajaran.

Sementara berkas laporan Ahok itu diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus ditindaklanjuti juga oleh BPK dengan cara menginvestigasi di lapangan.

"Sebaiknya untuk mengklarifikasi dugaan mark up itu, BPK segera melakukan audit keuangan dari anggaran UPS yang dikeluarkan di tahun 2014. Hasil ini akan terlihat perbandingan harga UPS sesungguhnya dengan anggaran yang dikeluarkan," ujar Robert kepada INDOPOS, kemarin (1/3).

Secara pribadi, Robert pun mengakui, nilai miliaran rupiah untuk proyek tersebut itu sangat tidak wajar. Terlebih efektivitas alat UPS itu bukan termasuk prioritas penunjang sarana kegiatan belajar-mengajar (KBM) guru dan murid di sekolah.

Sementara peningkatan gedung sekolah rusak ditelantarkan. "Untuk harga UPS sampai 6 milyar rupiah itu besar sekali. Prioritasnya juga belum tentu efektif. Nilai anggaran itu akan lebih efektif untuk peningkatan fisik gedung sekolah. Kalau soal harga sebenarnya berapa, itu biar BPK yang menganalisis," terang Robert.

Hal senada diungkapkan Ketua DPD Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) DKI Jakarta Agus Firmansyah. Menurut dia, persoalan pengadaan UPS itu harus diusut secara tuntas.

"Bukan tidak mungkin melibatkan oknum dewan dan pejabat pemprov dalam proyek itu. Meskipun masalah UPS terungkap dengan latar belakang kisruh APBD 2015, namun bisa menjadi kasus terpisah. Sehingga upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dapat terwujud," tandas dia.

Sementara Koordinator CBA (Centre for Budget Analysis) Uchok

Sky Khadafi menilai, semua dugaan korupsi di DKI termasuk kasus itu memang harus dibawa ke meja hukum. "Kalau memang ada pejabat di Dinas Pendidikan yang jadi mafia proyek, ya harus ditangkap," tukas dia. **(wok/asp)**